

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pati

Wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati memiliki penghasil baik, Namun tidak dapat dipungkiri penghasilan tersebut mampu memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari data tunggakan pajak pada tahun terakhir 2021 yang mengalami peningkatan tunggakan pajak senilai Rp 36.368.076.600. Tunggakan pajak disebabkan sebab kesadaran wajib pajak yang kurang, kurangnya sosialisasi perpajakan perihal pajak kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan yang masih kurang membuat pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati masih memiliki tunggakan pajak

Tunggakan pajak di Kabupaten Pati bisa dilihat dari tabel 1.1 tunggakan pajak kendaraan bermotor senilai Rp36.368.076.600, Meskipun demikian aparat samsat sudah melakukan sejumlah cara untuk masyarakat Pati agar kepatuhan dalam melunasi pajaknya meningkat. Diantaranya memberikan strategi pada bidang pelayanan lewat aplikasi elektronik *E-Samsat* yang bisa mempermudah dalam memenuhi keperluan wajib pajak kendaraan bermotor. Tapi program ini masih kurang maksimal terealisasi sebab wajib pajak yang kurang mengetahui adanya program itu.

2. Deskripsi Responden Penelitian

Deskripsi responden ialah suatu ciri atau sifat responden studi yang sudah dipilih untuk menjadi sampel. Sampel dalam studi ini ialah berjumlah 100 responden. Di lain sisi teknik pengambilan sampel yang dipakai ialah teknik *purposive sampling* atau berlandaskan tujuan penelitian. Dalam hal ini, yakni hanya mengambil konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati. Adapun data gambaran responden yang penulis peroleh bisa dilihat, yakni:

a. Jenis Kelamin

Adapun data dari 100 responden konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati, jika dilihat dari jenis kelamin, yakni:

Tabel 4.1

Deskripsi Data Responden Dilihat dari Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
1.	Laki-laki	58	58,0%
2.	Perempuan	42	42,0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olah SPSS, 2021.

Dari tabel 4.1 di atas, bisa ditarik sebuah simpulan bahwa sebagian besar responden konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati ialah laki-laki, yakni sebanyak 58 responden atau 58,0%, di lain sisi responden perempuan, yakni 42 responden atau 42,0%.

b. Umur

Adapun data umur responden dari 100 konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati, yakni:

Tabel 4.2

Deskripsi Data Responden Dilihat dari Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Presentase (%)
1.	Kurang dari 30	79	79,0%
2.	31-35	5	5,0%
3.	36-40	4	4,0%
4.	41-45	3	3,0%
5.	> 45	9	9,0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olah SPSS, 2021.

Dari tabel 4.2 di atas, didapat bahwa sebagian besar responden konsumen Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati ialah berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 79 responden atau 58,0%, responden yang berumur lebih dari 45 tahun, yakni sebanyak 9 responden atau 9,0%, responden yang berumur 31-35 tahun, yakni sebanyak 5 responden atau 42,0%, umur 36-40 tahun, yakni sebanyak 4 responden atau 4,0%, dan sisanya, yakni sebanyak 3 responden atau 3,0% ialah berumur 41-45 tahun.

c. Pendidikan Terakhir

Adapun data pendidikan dari 100 responden konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati, yakni:

Tabel 4.3

Deskripsi Data Responden Dilihat dari Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
1.	SD	0	0%
2.	SMP	10	10,0%
3.	SMA	51	51,0%
4.	Diploma	1	1,0%
5.	Perguruan Tinggi	38	38,0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olah SPSS, 2021.

Dari tabel 4.3 di atas bisa ditarik sebuah simpulan bahwa sebagian besar pendidikan responden konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati ialah SMA, yakni sebanyak 51 responden atau 51,0%, 38 responden atau 38,0% ialah pendidikannya perguruan tinggi, 10 responden atau 10,0% ialah pendidikannya SMP, dan selebihnya, yakni 1 responden atau 1,0 % ialah diploma.

d. Jenis Pekerjaan

Adapun data jenis pekerjaan dari 100 responden konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati ialah berikut ini:

Tabel 4.4
Deskripsi Data Responden Dilihat dari Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Presentase (%)
1.	Pelajar/Mahasiswa	52	52,0%
2.	PNS	29	29,0%
3.	Karyawan Swasta	10	10,0%
4.	Lainnya	9	9,0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olah SPSS, 2021.

Dari tabel 4.4 di atas, bisa penulis simpulkan bahwa sebagian besar responden konsumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pati ialah pekajar/mahasiswa yang berjumlah 52 responden atau 52,0%, 29 responden atau 29,0% ialah PNS, 10 responden atau 10,0% ialah bekerja sebagai karyawan swasta, dan sisanya, yakni sebanyak 9 responden atau 9,0% ialah jenis pekerjaan lainnya.

3. Deskripsi Jawaban Responden

Dari hasil yang didapati dari data responden terkait kepatuhan wajib pajak, sosialisasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan bisa diuraikan, yakni:

a. Data Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Jawaban responden kepatuhan wajib pajak bermaksud untuk menghimpun data maklumat dari pendapat responden perihal kepatuhan wajib pajak. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran memakai skala *likert* dimana pendapat bisa diketahui lewat angka tinggi atau rendahnya jawaban responden perihal kepatuhan wajib pajak. Ada 6 indikator pernyataan, indikator pertama, yakni kedisiplinan melunasi pajak, indikator yang kedua, yakni

tingkat pengetahuan pada pajak, indikator ketiga, yakni sosialisasi perihal pajak, indikator keempat, yakni sosialisasi tentang sanksi administrasi pajak, indikator kelima, yakni wajib pajak paham dan berupaya memahami UU perpajakan, indikator keenam, yakni patuh pada pajak. Di lain sisi untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, Netral (N) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian, yakni:

Tabel 4.5
Data Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak										
Pernyataan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
Y.1	23	23	47	47	22	22	8	8	0	0
Y.2	27	27	43	43	27	27	3	3	0	0
Y.3	20	20	52	52	24	24	4	4	0	0
Y.4	19	19	59	59	18	18	4	4	0	0
Y.5	22	22	50	50	24	24	4	4	0	0
Y.6	22	22	51	51	24	24	3	3	0	0
Y.7	23	23	56	56	14	14	7	7	0	0
Total	156	156	358	358	153	153	33	33	0	0

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2021

Berlandaskan tabel 4.4 yang sudah dihasilkan, diatas analisisnya, yakni: Pada item pernyataan (Y.1), yakni melunasi pajak dengan disiplin akan mempertinggi kepatuhan wajib pajak. Responden memilih menjawab

sangat setuju berjumlah 23 responden dengan presentase 23%, setuju berjumlah 47 responden dengan presentase 47%, netral 22 responden dengan presentase 22%, tidak setuju 8 responden dengan presentase 8%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 47% dinyatakan responden sudah melunasi pajak dengan disiplin akan mempertinggi kepatuhan wajib pajak.

Pada item pernyataan (Y.2), yakni dengan mengetahui batas tanggal pembayaran dan pelaporan perpajakan diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam menyetor pajak dan melaporkan sesuai batas waktu yang di tentukan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 27 responden dengan presentase 27%, setuju berjumlah 43 responden dengan presentase 43%, netral 27 responden dengan presentase 27%, tidak setuju 3 responden dengan presentase 3%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 43% dinyatakan responden sudah mengetahui batas tanggal pembayaran dan pelaporan perpajakan diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam menyetor pajak dan melaporkan sesuai batas waktu yang di tentukan.

Pada item pernyataan (Y.3), yakni setujukah anda, sosialisasi pajak diimplementasikan agar wajib pajak sadar dan mematuhi kewajibannya. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 20 responden dengan presentase 20%, setuju berjumlah 52 responden dengan presentase 52%, netral 24 responden dengan presentase 24%, tidak setuju 4 responden dengan presentase 4%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 52% dinyatakan responden sudah menyetujui sosialisasi pajak diimplementasikan agar wajib pajak sadar dan mematuhi kewajibannya.

Pada item pernyataan (Y.4) setujukah anda, dengan adanya sanksi akan mempengaruhi tingkat kesadaran membayar wajib pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 19 responden dengan presentase 19%, setuju berjumlah 59 responden dengan

presentase 59%, netral 18 responden dengan presentase 18%, tidak setuju 4 responden dengan presentase 4%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 50% dinyatakan responden sudah menyetujui dengan adanya sanksi akan mempengaruhi tingkat kesadaran membayar wajib pajak.

Pada item pernyataan (Y.5) melunasi pajak kendaraan bermotor tepat waktu bermakna ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 22 responden dengan presentase 22%, setuju berjumlah 50 responden dengan presentase 50%, netral 24 responden dengan presentase 24%, tidak setuju 4 responden dengan presentase 4%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 50% dinyatakan responden sudah melunasi pajak kendaraan bermotor tepat waktu bermakna ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Pada item pernyataan (Y.6) pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 22 responden dengan presentase 22%, setuju berjumlah 51 responden dengan presentase 51%, netral 24 responden dengan presentase 24%, tidak setuju 3 responden dengan presentase 3%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 51% dinyatakan responden sudah menyetujui pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah daerah bukan pemerintah pusat.

Pada item pernyataan (Y.7) memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 23 responden dengan presentase 23%, setuju berjumlah 56 responden dengan presentase 56%, netral 14 responden dengan presentase 14%, tidak setuju 7 responden dengan presentase 7%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa

tingginya jawaban setuju dengan presentase 51% dinyatakan responden sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Data Jawaban Responden Sosialisasi Perpajakan

Jawaban responden sosialisasi perpajakan bermaksud untuk menghimpun data maklumat dari pendapat responden perihal sosialisasi perpajakan. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran memakai skala *likert* dimana pendapat bisa diketahui lewat angka tinggi atau rendahnya jawaban responden perihal sosialisasi perpajakan. Ada 4 indikator pernyataan, indikator pertama, yakni tatacara sosialisasi perpajakan, indikator yang kedua, yakni frekuensi sosialisasi, indikator ketiga, yakni kejelasan sosialisasi, indikator keempat, yakni pengetahuan perpajakan. Di lain sisi untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, Netral (N) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian, yakni:

Tabel 4.6
Data Jawaban Responden Sosialisasi Perpajakan
(X1)

Variabel (X1) Sosialisasi Perpajakan										
Pernyataan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
X1.1	23	23	47	47	22	22	8	8	0	0
X1.2	20	20	25	25	31	31	24	24	0	0
X1.3	26	26	15	15	35	35	24	24	0	0
X1.4	26	26	42	42	15	15	17	17	0	0
X1.5	22	22	33	33	31	31	14	14	0	0

X1.6	14	14	35	35	36	36	15	15	0	0
X1.7	26	26	42	42	22	22	10	10	0	0
X1.8	28	28	37	37	29	29	6	6	0	0
X1.9	29	29	50	50	15	15	6	6	0	0
Total	214	214	326	326	236	236	124	124	0	0

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2021

Berlandaskan tabel 4.6 yang sudah dihasilkan, diatas analisisnya, yakni: Pada item pernyataan (X1.1), yakni setujuakah anda, sosialisasi perpajakan yang dijalankan oleh oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak bisa memberi pengetahuan dan pemahaman pada wajib pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 23 responden dengan presentase 23%, setuju berjumlah 47 responden dengan presentase 47%, netral 22 responden dengan presentase 22%, tidak setuju 8 responden dengan presentase 8%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 47% dinyatakan responden sudah menyetujui sosialisasi perpajakan yang dijalankan oleh oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak bisa memberi pengetahuan dan pemahaman pada wajib pajak.

Pada item pernyataan (X1.2), yakni setujuakah anda, bahwa penyuluhan pajak Kendaraan bermotor ialah sarana untuk penyampaian maklumat. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 20 responden dengan presentase 20%, setuju berjumlah 25 responden dengan presentase 25%, netral 31 responden dengan presentase 31%, tidak setuju 24 responden dengan presentase 24%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban kurang setuju dengan presentase 31% dinyatakan responden sudah kurang menyetujui penyuluhan pajak Kendaraan bermotor ialah sarana untuk penyampaian maklumat.

Pada item pernyataan (X1.3), yakni setujuakah anda, sosialisasi pajak dilakukan secara teratur dengan memberikan maklumat yang terkini, sehingga wajib pajak mengetahui saat menjalankan kewajiban pajaknya.

Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 responden dengan presentase 26%, setuju berjumlah 15 responden dengan presentase 15%, netral 35 responden dengan presentase 35%, tidak setuju 24 responden dengan presentase 24%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban kurang setuju dengan presentase 35% dinyatakan responden sudah kurang menyetujui sosialisasi pajak dilakukan secara teratur dengan memberikan maklumat yang terkini, sehingga wajib pajak mengetahui saat menjalankan kewajiban pajaknya.

Pada item pernyataan (X1.4), yakni setujuakah anda, sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor yang rutin membuat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Samsat Kabupaten Pati. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 responden dengan presentase 26%, setuju berjumlah 42 responden dengan presentase 42%, netral 15 responden dengan presentase 15%, tidak setuju 17 responden dengan presentase 17%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 42% dinyatakan responden sudah menyetujui sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor yang rutin membuat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Samsat Kabupaten Pati.

Pada item pernyataan (X1.5), yakni setujuakah anda, perpajakan kendaraan bermotor yang baik ialah wujud sosialisasi yang diselenggarakan secara berkala oleh Samsat Kabupaten Pati. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 22 responden dengan presentase 22%, setuju berjumlah 33 responden dengan presentase 33%, netral 31 responden dengan presentase 31%, tidak setuju 14 responden dengan presentase 14%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban kurang setuju

dengan presentase 33% dinyatakan responden sudah kurang menyetujui perpajakan kendaraan bermotor yang baik ialah wujud sosialisasi yang diselenggarakan secara berkala oleh Samsat Kabupaten Pati.

Pada item pernyataan (X1.6), yakni setujuakah anda, kejelasan dalam penyampaian sosialisasi perpajakan bisa membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 14 responden dengan presentase 14%, setuju berjumlah 35 responden dengan presentase 35%, netral 36 responden dengan presentase 36%, tidak setuju 15 responden dengan presentase 15%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban kurang setuju dengan presentase 35% dinyatakan responden sudah kurang menyetujui kejelasan dalam penyampaian sosialisasi perpajakan bisa membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada item pernyataan (X1.7), yakni setujuakah anda, bahwa pemberian maklumat perpajakan yang disampaikan oleh petugas sudah jelas. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 responden dengan presentase 26%, setuju berjumlah 42 responden dengan presentase 42%, netral 22 responden dengan presentase 22%, tidak setuju 10 responden dengan presentase 10%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 42% dinyatakan responden sudah menyetujui kejelasan dalam penyampaian sosialisasi perpajakan bisa membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada item pernyataan (X1.8), yakni setujuakah anda, peran petugas pajak Kantor Samsat Kabupaten Pati amat vital dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 28 responden dengan presentase 28%, setuju berjumlah 37 responden dengan presentase 37%, netral 29 responden dengan presentase 29%, tidak setuju 6 responden dengan presentase 6%, dan sangat tidak setuju

berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 37% dinyatakan responden sudah menyetujui peran petugas pajak Kantor Samsat Kabupaten Pati amat vital dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan.

Pada item pernyataan (X1.9), yakni setujuakah anda, penyampaian maklumat perpajakan oleh petugas pajak bisa memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 29 responden dengan presentase 29%, setuju berjumlah 50 responden dengan presentase 50%, netral 15 responden dengan presentase 15%, tidak setuju 6 responden dengan presentase 6%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 50% dinyatakan responden sudah menyetujui penyampaian maklumat perpajakan oleh petugas pajak bisa memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

c. **Data Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak**

Jawaban responden kesadaran wajib pajak bermaksud untuk menghimpun data maklumat dari pendapat responden perihal kesadaran wajib pajak. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran memakai skala *likert* dimana pendapat bisa diketahui lewat angka tinggi atau rendahnya jawaban responden perihal kesadaran wajib pajak. Ada 4 indikator pernyataan, indikator pertama kegunaan pajak, indikator yang kedua, yakni ketepatan pembayaran pajak, indikator ketiga, yakni pengisian formulir pajak, indikator keempat, yakni sanksi pembayaran pajak. Di lain sisi untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, Netral (N) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian, yakni:

Tabel 4.7
Data Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak

Variabel (X2) Kesadaran Wajib Pajak										
Pernyataan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
X2.1	13	13	47	47	28	28	12	12	0	0
X2.2	21	21	35	35	30	30	14	14	0	0
X2.3	25	25	37	37	27	27	11	11	0	0
X2.4	21	21	44	44	20	10	15	15	0	0
X2.5	19	19	39	39	30	30	12	12	0	0
X2.6	18	18	45	45	29	29	8	8	0	0
X2.7	29	29	37	37	23	23	11	11	0	0
Total	146	146	284	284	187	187	83	83	0	0

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2021

Berlandaskan tabel 4.7 yang sudah dihasilkan, diatas analisisnya, yakni: Pada item pernyataan (X2.1), yakni setuju bahwa anda, teknologi maklumat mempermudah pelaporan sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 13 responden dengan presentase 13%, setuju berjumlah 47 responden dengan presentase 47%, netral 28 responden dengan presentase 28%, tidak setuju 12 responden dengan presentase 12%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 47% dinyatakan responden sudah menyetujui teknologi maklumat mempermudah pelaporan sehingga

mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.

Pada item pernyataan (X2.2), yakni setuju bahwa anda, melunasi pajak bisa menunjang kemajuan dan pembangunan negara. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 21 responden dengan presentase 21%, setuju berjumlah 35 responden dengan presentase 35%, netral 30 responden dengan presentase 30%, tidak setuju 14 responden dengan presentase 14%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 35% dinyatakan responden sudah menyetujui melunasi pajak bisa menunjang kemajuan dan pembangunan negara.

Pada item pernyataan (X2.3), yakni setuju bahwa anda, melunasi pajak secara teratur bisa membantu mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 25 responden dengan presentase 25%, setuju berjumlah 37 responden dengan presentase 37%, netral 27 responden dengan presentase 27%, tidak setuju 11 responden dengan presentase 11%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 37% dinyatakan responden sudah menyetujui melunasi pajak secara teratur bisa membantu mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

Pada item pernyataan (X2.4), yakni wajib pajak mematuhi peraturan dengan mengisi form pendaftaran yang sudah di sediakan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 21 responden dengan presentase 21%, setuju berjumlah 44 responden dengan presentase 44%, netral 20 responden dengan presentase 20%, tidak setuju 15 responden dengan presentase 15%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 44% dinyatakan responden sudah menyetujui wajib pajak mematuhi peraturan dengan mengisi form pendaftaran yang sudah di sediakan.

Pada item pernyataan (X2.5), yakni masyarakat percaya akan petugas pajak yang mampu mengelola hasil

pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 19 responden dengan presentase 19%, setuju berjumlah 39 responden dengan presentase 39%, netral 30 responden dengan presentase 30%, tidak setuju 12 responden dengan presentase 12%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 39% dinyatakan responden sudah percaya akan petugas pajak yang mampu mengelola hasil pajak.

Pada item pernyataan (X2.6), yakni pelunasan yang tepat maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 18 responden dengan presentase 18%, setuju berjumlah 45 responden dengan presentase 45%, netral 29 responden dengan presentase 29%, tidak setuju 8 responden dengan presentase 8%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 45% dinyatakan responden sudah pelunasan yang tepat maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi.

Pada item pernyataan (X2.7) pelunasan yang tepat maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 29 responden dengan presentase 29%, setuju berjumlah 37 responden dengan presentase 37%, netral 23 responden dengan presentase 23%, tidak setuju 11 responden dengan presentase 11%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 37% dinyatakan responden sudah menjalankan pelunasan yang tepat maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi.

d. Data Jawaban Responden Kualitas Pelayanan

Jawaban responden kualitas pelayanan bermaksud untuk menghimpun data maklumat dari pendapat responden perihal kualitas pelayanan. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran memakai skala *likert* dimana pendapat bisa diketahui lewat angka tinggi atau rendahnya jawaban responden perihal kualitas pelayanan. Ada 4 indikator pernyataan, indikator pertama fiskus diharapkan memiliki

kemampuan pengetahuan dan pengalaman, indikator yang kedua, yakni fiskus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayanan publik, indikator ketiga, yakni perluasan tempat pelayanan terpadu, indikator keempat, yakni TPT bisa mempermudah pengawasan pada proses pelayanan yang diberikan pada wajib pajak. Di lain sisi untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, Netral (N) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian, yakni:

Tabel 4.8
Data Jawaban Responden Kualitas Pelayanan

Variabel (X3) Kualitas Pelayanan										
Pernyataan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
X3.1	23	23	37	37	31	31	9	9	0	0
X3.2	22	22	44	44	22	22	12	12	0	0
X3.3	25	25	41	41	22	22	12	12	0	0
X3.4	26	26	41	41	21	21	12	12	0	0
X3.5	31	31	31	31	29	29	9	9	0	0
Total	127	127	194	194	125	125	54	54	0	0

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2021

Berlandaskan tabel 4.8 yang sudah dihasilkan, diatas analisisnya, yakni: Pada item pernyataan (X3.1), yakni petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 23 responden dengan presentase 23%, setuju berjumlah 37 responden dengan presentase 37%, netral 31 responden dengan presentase 31%, tidak setuju 9 responden dengan presentase 9%, dan sangat tidak setuju

berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 37% dinyatakan responden sudah menyetujui petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik.

Pada item pernyataan (X3.2), yakni para petugas memiliki penampilan yang rapi menarik dan sopan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 22 responden dengan presentase 22%, setuju berjumlah 44 responden dengan presentase 44%, netral 22 responden dengan presentase 22%, tidak setuju 12 responden dengan presentase 12%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 44% dinyatakan responden sudah menyetujui para petugas memiliki penampilan yang rapi menarik dan sopan.

Pada item pernyataan (X3.3), yakni petugas pajak memberikan perhatian pada persoalan yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 25 responden dengan presentase 25%, setuju berjumlah 41 responden dengan presentase 41%, netral 22 responden dengan presentase 22%, tidak setuju 12 responden dengan presentase 12%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 41% dinyatakan responden sudah menyetujui petugas pajak memberikan perhatian pada persoalan yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak.

Pada item pernyataan (X3.4), yakni fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 responden dengan presentase 26%, setuju berjumlah 41 responden dengan presentase 41%, netral 21 responden dengan presentase 21%, tidak setuju 12 responden dengan presentase 12%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 41% dinyatakan responden sudah menyetujui fasilitas fisik

(ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik.

Pada item pernyataan (X3.5), yakni fasilitas pembayaran bisa diakses internet tiap-tiap saat dengan cepat dan mudah dan maklumat yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan *up to date*. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 31 responden dengan presentase 31%, setuju berjumlah 31 responden dengan presentase 31%, netral 29 responden dengan presentase 29%, tidak setuju 9 responden dengan presentase 9%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 31% dinyatakan responden sudah menikmati fasilitas pembayaran bisa diakses internet tiap-tiap saat dengan cepat dan mudah dan maklumat yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan *up to date*.

e. Data Jawaban Responden Sanksi Perpajakan

Jawaban responden sanksi perpajakan bermaksud untuk menghimpun data maklumat dari pendapat responden perihal sanksi perpajakan. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran memakai skala *likert* dimana pendapat bisa diketahui lewat angka tinggi atau rendahnya jawaban responden perihal sanksi perpajakan. Ada 3 indikator pernyataan, indikator pertama wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor, indikator yang kedua, yakni pengenaan penalti yang cukup berat ialah satu dari sekian untuk mengedukasi wajib pajak, indikator ketiga, yakni sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang menyeleweng dari toleransi. Di lain sisi untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, Netral (N) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian, yakni:

Tabel 4.9
Data Jawaban Responden Sanksi
Perpajakan

Variabel (X4) Sanksi Perpajakan										
Pernyataan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
X4.1	31	31	31	31	25	25	13	13	0	0
X4.2	35	35	28	28	25	25	12	12	0	0
X4.3	26	26	38	38	24	24	12	12	0	0
X4.4	21	21	36	36	32	32	11	11	0	0
X4.5	29	29	36	36	24	24	11	11	0	0
X4.6	23	23	37	37	31	31	9	9	0	0
Total	165	165	206	206	161	161	54	54	0	0

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2021

Berlandaskan tabel 4.9 yang sudah dihasilkan, diatas analisanya, yakni: Pada item pernyataan (X4.1), yakni adanya bunga dalam tunggakan pajak saat terlambat membayar. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 31 responden dengan presentase 31%, setuju berjumlah 31 responden dengan presentase 31%, netral 25 responden dengan presentase 25%, tidak setuju 13 responden dengan presentase 13%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 31% dinyatakan responden sudah menyetujui adanya bunga dalam tunggakan pajak saat terlambat membayar.

Pada item pernyataan (X4.2), yakni wajib pajak membayar kewajiban pajak dan tunggakan pajaknya. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 35 responden dengan presentase 35%, setuju berjumlah 28 responden dengan presentase 28%, netral 25

responden dengan presentase 25%, tidak setuju 12 responden dengan presentase 12%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 35% dinyatakan responden sudah menyetujui wajib pajak membayar kewajiban pajak dan tunggakan pajaknya.

Pada item pernyataan (X4.3), yakni wajib pajak yang terkena sanksi administrasi akan bertanggung jawab dan jera. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 responden dengan presentase 26%, setuju berjumlah 38 responden dengan presentase 38%, netral 24 responden dengan presentase 24%, tidak setuju 12 responden dengan presentase 12%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 38% dinyatakan responden sudah menyetujui wajib pajak yang terkena sanksi administrasi akan bertanggung jawab dan jera.

Pada item pernyataan (X4.4), yakni wajib pajak mengetahui sanksi administrasi yang akan diterima jika melanggar peraturan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 21 responden dengan presentase 21%, setuju berjumlah 36 responden dengan presentase 36%, netral 32 responden dengan presentase 32%, tidak setuju 11 responden dengan presentase 11%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 36% dinyatakan responden sudah menyetujui wajib pajak mengetahui sanksi administrasi yang akan diterima jika melanggar peraturan.

Pada item pernyataan (X4.5), yakni wajib pajak yang terkena sanksi pidana akan bertanggung jawab dan jera. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 29 responden dengan presentase 29%, setuju berjumlah 36 responden dengan presentase 36%, netral 24 responden dengan presentase 24%, tidak setuju 11 responden dengan presentase 11%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 36% dinyatakan responden sudah menyetujui wajib pajak

yang terkena sanksi pidana akan bertanggung jawab dan jera.

Pada item pernyataan (X4.6), yakni sanksi perpajakan diberlakukan secara konsisten. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 23 responden dengan presentase 23%, setuju berjumlah 37 responden dengan presentase 37%, netral 31 responden dengan presentase 31%, tidak setuju 9 responden dengan presentase 9%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 37% dinyatakan responden sudah menyetujui sanksi perpajakan diberlakukan secara konsisten.

4. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas bermaksud untuk menguji valid tidaknya pernyataan kuisioner. Dasar pengambilan keputusan dengan memakai uji 2 (dua) sisi dan taraf signifikasi 0,05 suatu data bisa dikatakan valid jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ ((uji 2 sisi dengan sig, 0,05) maka data dari kuesioner itu berkorelasi signifikan pada skor total sehingga data itu dinyatakan valid, $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig, 0,05) maka data dari kuesioner itu tidak berkorelasi signifikan pada skor total sehingga data itu dinyatakan tidak valid.¹ Nilai r hitung diambil dari hasil *output* SPSS For Windows 21.0 pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Di lain sisi nilai r tabel dihitung dengan memakai rumus $df = n - 2$.² Dengan rumus itu maka di bisa $df = n - 2 = 100 - 2 = 98$ dengan alpha sejumlah 5% maka menghasilkan r tabel sejumlah 0,1966.

Di lain sisi uji reliabilitas bermaksud memastikan apakah kuisioner studi yang akan dipakai untuk menghimpun variabel data penelitian reliabel atau tidak. Responden cenderung mengarahkan pilihan hanya kesatu opsi jawaban. Data bisa dikatakan reliabel jika *cronbach alpha* memiliki nilai $>0,60$ maknanya instrumen itu bisa

¹ Sugiono, "Metode Studi kuantitatif RnD Kualitatif" (Bandung: Alfabeta), hlm. 54

² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 49.

dipercaya dan bisa menjadi sarana pengumpulan data yang baik dan handal.³

a. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Uji validitas bermaksud untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan memiliki jawaban yang serupa dalam artian pernyataan itu bisa dimengerti oleh responden perihal kepatuhan wajib pajak. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk menguak fakta perihal valid tidaknya pernyataan kuisioner. Adapun hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak, yakni:

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P1	0,632	0,1966	Valid
	P2	0,681	0,1966	
	P3	0,732	0,1966	
	P4	0,829	0,1966	
	P5	0,578	0,1966	
	P6	0,729	0,1966	
	P7	0,704	0,1966	

Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan tabel 4.10 diatas, maka bisa diketahui bahwa *Corrected Item-Total Correlation* memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,3610, yang bermakna semua butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Uji validitas bermaksud untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan memiliki jawaban yang serupa dalam artian pernyataan itu bisa dimengerti oleh responden perihal sosialisasi perpajakan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk menguak fakta

³ Sugiono, "Metode Studi kuantitatif RnD Kualitatif" (Bandung: Alfabeta), hlm. 57

perihal valid tidaknya pernyataan kuisioner. Adapun hasil uji validitas sosialisasi perpajakan, yakni:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Item	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	P1	0,573	0,1966	Valid
	P2	0,598	0,1966	
	P3	0,658	0,1966	
	P4	0,670	0,1966	
	P5	0,703	0,1966	
	P6	0,500	0,1966	
	P7	0,699	0,1966	
	P8	0,490	0,1966	
	P9	0,764	0,1966	

Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan tabel 4.11 diatas, maka bisa diketahui bahwa *Corrected Item-Total Correlation* memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,1966 yang bermakna semua butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

c. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Uji validitas bermaksud untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan memiliki jawaban yang serupa dalam artian pernyataan itu bisa dimengerti oleh responden perihal kesadaran wajib pajak. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk menguak fakta perihal valid tidaknya pernyataan kuisioner. Adapun hasil uji validitas kesadaran wajib pajak, yakni:

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Item	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	P1	0,563	0,1966	Valid
	P2	0,562	0,1966	
	P3	0,741	0,1966	
	P4	0,604	0,1966	
	P5	0,455	0,1966	
	P6	0,436	0,1966	
	P7	0,364	0,1966	

Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan tabel 4.12 di atas, maka bisa diketahui bahwa *Corrected Item-Total Correlation* memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,1966, yang bermakna semua butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

d. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan

Uji validitas bermaksud untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan memiliki jawaban yang serupa dalam artian pernyataan itu bisa dimengerti oleh responden perihal kualitas pelayanan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk menguak fakta perihal valid tidaknya pernyataan kuisioner. Adapun hasil uji validitas kualitas pelayanan, yakni:

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan

Variabel	Item	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Kualitas Pelayanan	P1	0,799	0,1966	
	P2	0,917	0,1966	

(X3)	P3	0,926	0,1966	Valid
	P4	0,924	0,1966	
	P5	0,819	0,1966	

Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan tabel 4.13 di atas, maka bisa diketahui bahwa *Corrected Item-Total Correlation* memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,1966, yang bermakna semua butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

e. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Uji validitas bermaksud untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan memiliki jawaban yang serupa dalam artian pernyataan itu bisa dimengerti oleh responden perihal sanksi perpajakan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk menguak fakta perihal valid tidaknya pernyataan kuisioner. Adapun hasil uji validitas sanksi perpajakan, yakni:

Tabel 4.14

Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Variabel	Item	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X4)	P1	0,829	0,1966	Valid
	P2	0,770	0,1966	
	P3	0,837	0,1966	
	P4	0,793	0,1966	
	P5	0,758	0,1966	
	P6	0,653	0,1966	

Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan tabel 4.14 diatas, maka bisa diketahui bahwa *Corrected Item-Total Correlation* memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,1966, yang bermakna semua butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

f. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak bermaksud untuk menguji pada seluruh pernyataan bisa dikatakan reliabel jika responden bisa memahami dari pernyataan dalam jangka waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang serupa. Hasil uji reliabilitas pernyataan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan menghasilkan, yakni:

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Responden

Variabel	<i>Reliability Coefficiance</i>	<i>Cronbach's Alpha (> 0,60)</i>	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	9 item	0,766	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	7 item	0,744	<i>Reliabel</i>
Kualitas Pelayanan (X3)	5 item	0,956	<i>Reliabel</i>
Sanksi Perpajakan (X4)	6 item	0,920	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	7 item	0,896	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan tabel 4.15 di atas, maka bisa diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari seluruh variabel yang diuji lebih dari 0,60, maka bisa ditarik sebuah simpulan bahwa seluruh konstruk atau variabel dalam studi ini dinyatakan reliabel.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

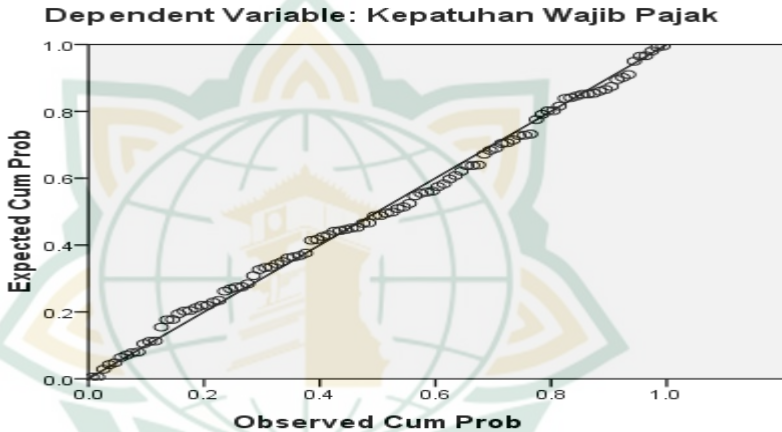
a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk menguak fakta perihal apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat data yang diuji berdistribusi normal atau tidak, bisa dilihat dari dua analisis, yakni analisis grafik dan uji statistik. Hasil uji normalitas data bisa dilihat dengan memperhatikan titik *Normal P-Plat of*

Regression Standizzed Residual dari variabel terikat. Adapun hasil pengujian normalitas, yakni:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

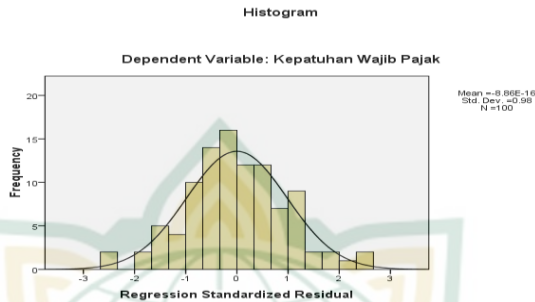
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah, 2021

Dari gambar di atas, uji normalitas bisa dilihat dengan memakai grafik normal P-P Plot berlandaskan gambar di atas, tampak titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehubungan dengan hal itu, data yang dipakai sudah memenuhi asumsi klasik dan bisa dikatakan data terdistribusi normal.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2021

Dari grafik histogram pada gambar di atas, residual data sudah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna. Sehubungan dengan hal itu, data yang dipakai sudah memenuhi asumsi klasik dan bisa dikatakan data terdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dipakai untuk menguji apa dalam model regresi ada korelasi antar variabel bebas yang diharuskan korelasi itu tidak ada. Jika ada korelasi antar variabel bebas maka variabel-variabel itu maknanya tidak ortogonal atau tidak memiliki nilai korelasi sama dengan nol. Multikolineritas bisa ditunjukkan dengan nilai *Tolerance and Variance Inflation Factor* (VIF) yang masing-masing harus memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.⁴ Dari hasil pengujian SPSS didapat nilai korelasi antar kedua variabel-variabel bebas, yakni:

⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, 95- 96.

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinierity Statistics</i>	
	<i>Nilai Tollerance</i>	Nilai VIF
Sosialisasi Perpajakan	0,852	1,174
Kesadaran Wajib Pajak	0,916	1,092
Kualitas Pelayanan	0,300	3,333
Sanksi Perpajakan	0,290	3,451

Sumber: Data diolah, 2021

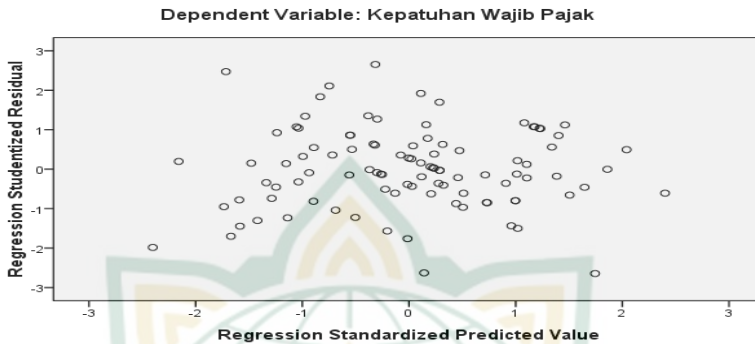
Menurut hasil pengujian multikolonieritas yang dijalankan diketahui bahwa nilai tolerance variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan masing-masing sejumlah: 0,852; 0,916; 0,300; 0,290 dan VIF masing-masing sejumlah: 1,174; 1,092; 3,333; 3,451. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *Tollerance* lebih dari 0,10 dan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi bisa ditarik sebuah simpulan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai untuk menguak fakta perihal apakah dalam model regresi yang diuji ada perbedaan atau ketidaksamaan antar variabel satu ke yang lainnya atau tidak. Jika nilai variabel dari satu ke yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Uji model regresi yang baik ialah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.⁵ Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas, yakni:

⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, 125.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan grafik *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi bisa ditarik sebuah simpulan bahwa tidak terjadi persoalan heterokedastisitas pada model regresi.

6. Hasil Uji Hipotesa

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis dari studi yang sudah dirumuskan sebelumnya, yakni untuk menguak fakta perihal apakah ada pengaruh antara variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Maka bisa diketahui hasilnya, yakni:

Tabel 4.17

Hasil Regresi Berganda

Variabel	Nilai β
<i>Constanta</i>	8,791
Sosialisasi Perpajakan	0,187
Kesadaran Wajib Pajak	0,664

Kualitas Pelayanan	0,179
Sanksi Perpajakan	0,369

Sumber: Data Diolah, 2021.

Dari hasil tabel 4.17 di atas, maka wujud persamaan regresi dalam peneltian ini, yakni:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_3X_3 ++ b_4X_4 + e$$

$$Y = 8,791 + 0,187X_1 + 0,664X_2 + 0,179X_3 + 0,369X_4 + e$$

Dapat diinterpretasikan, yakni:

Variabel sosialisasi perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,187 dapat diartikan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada sosialisasi perpajakan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,187.

Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,664 dapat diartikan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,664.

Variabel kualitas pelayanan (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,179 dapat diartikan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada kualitas pelayanan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,179.

Variabel sanksi perpajakan (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,369 dapat diartikan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada sanksi perpajakan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,369.

b. Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) dipakai untuk mengukur seberapa besar pengaruh nilai model variabel

bebas dalam memaparkan variabel dependen atau terikat.⁶ Hasil dari analisis koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 ⁰	.534	.514	2.98733

Sumber: Data Diolah, 2021.

Berlandaskan hasil analisa regresi linear berganda nilai *adjusted R²* untuk model studi ini pada tabel 4.18 di atas, yakni sejumlah 0,514, nilai ini bermakna 51,4% variasi dari kepatuhan wajib pajak bisa dipaparkan oleh variasi dari variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Di lain sisi sisanya sejumlah 0,486 atau 48,6% dipaparkan oleh aspek-aspek lain yang tidak dimasukkan dalam studi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek variabel yang dipakai dalam studi ini sudah mewakili variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

c. Hasil Uji F (*Simultan*)

Uji F diuji untuk menunjukkan seberapa besar nilai uji F yang ditunjukkan pada variabel bebas yang secara bersama-sama berimbaskan pada variabel dependen atau terikat.⁷ F tabel bisa dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikansi 5%, maka $df_1 = 4$ dan $df_2 = (n-k-1) = (100-4-1) = 95$ maka didapat hasil untuk F tabel sejumlah 2,47.

⁶ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, 87.

⁷ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, 88.

Tabel 4.19
Hasil Uji F

Model	Sum Of Square	df	Mean Square	F	Sig
1	969.598	4	242.399	27.162	.000 ⁰
Regression	847.792	95	8.924		
Residual	1817.390	99			
Total					

Sumber: Data diolah, 2021

Berlandaskan tabel 4.19 di atas, maka dalam studi ini memiliki nilai F_{hitung} sejumlah 27,162. Sehubungan dengan hal itu nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($27,162 > 2,47$). Maka bisa ditarik sebuah simpulan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berimbas pada pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pati.

d. Hasil Uji T (Persial)

Uji statistik atau uji t dipakai untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara masing-masing individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji statistik atau uji t bisa dilihat dari nilai t hitungnya. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka hipotesisnya di terima. Sebaliknya jika nilai t hitung kurang dari t tabel, hipotesisnya bermakna ditolak.⁸ Sehingga t tabel didapat $df (n-k) = (100-4)$ atau derajat kebebasan 96 dengan signifikan 5% hasil t tabel sejumlah 1,9849. Pemaparan lebih lengkapnya dari hasil nilai uji t pada studi ini, bisa dilihat pada tabel, yakni:

Tabel 4.20
Hasil Uji T

Model	t	Sig.
1 (Constan)	3.388	.001
Sosialisasi Perpajakan	3.057	.003
Kesadaran Wajib Pajak	8.622	.000
Kualitas Pelayanan	3.430	.006

⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, 89.

Sanksi Perpajakan	3.277	.001
-------------------	-------	------

Sumber: Data Diolah, 2021.

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (H1)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam studi ini ialah pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati. Berlandaskan tabel 4.20 mengindikasikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 3,057 dengan signifikansi 0,003 sebab besarnya t_{hitung} 3,057 > t_{tabel} sejumlah 1,9849 dan tingkat signifikansinya 0,003 < 0,05. Sehingga bisa ditarik sebuah simpulan bahwa **H1 diterima** variabel sosialisasi perpajakan berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y) maka berbunyi:

HO : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan wajib pajak (H2)

Hipotesis kedua yang diajukan dalam studi ini ialah pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati. Berlandaskan tabel 4.20 mengindikasikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} 8,622 dengan signifikansi 0,000 sebab besarnya t_{hitung} 8,622 > t_{tabel} sejumlah 1,9849 dan tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05. Sehingga bisa ditarik sebuah simpulan bahwa **H2 diterima** variabel kesadaran wajib pajak berimbas positif dan

signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y) maka berbunyi:

- HO : Tidak terdapat pengaruh positif dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.
- H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan pada kepatuhan wajib pajak (H3)

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam studi ini ialah pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati. Berlandaskan tabel 4.20 mengindikasikan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki nilai t_{hitung} 3,430 dengan signifikansi 0,006 sebab besarnya t_{hitung} 3,430 $> t_{tabel}$ sejumlah 1,9849 dan tingkat signifikansinya $0,006 < 0,05$. Sehingga bisa ditarik sebuah simpulan bahwa **H3 diterima** variabel kualitas pelayanan berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y) maka berbunyi:

- HO : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.
- H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (H4)

Hipotesis keempat yang diajukan dalam studi ini ialah pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati. Berlandaskan tabel 4.20 mengindikasikan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 3,277

dengan signifikansi 0,001 sebab besarnya t_{hitung} 3,277 > t_{tabel} sejumlah 1,9849 dan tingkat signifikansinya $0,001 < 0,05$. Sehingga bisa ditarik sebuah simpulan bahwa **H4 diterima** variabel sanksi perpajakan berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y) maka berbunyi:

HO : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

H4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (H5)

Hipotesis keempat yang diajukan dalam studi ini ialah pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati. Berlandaskan tabel 4.19 F_{hitung} sejumlah 27,162. Sehubungan dengan hal itu nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($27,162 > 2,47$). Maka bisa ditarik sebuah simpulan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berimbas pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pati maka **H5 diterima** variabel sanksi perpajakan berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y) maka berbunyi:

HO : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

H5 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib

pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak

Berlandaskan hasil uji yang dijalankan, peneliti menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_1) memiliki imbas positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dibuktikan nilai antara t hitung sejumlah 3,057 lebih besar dengan nilai t tabel sejumlah 1,9849.

Tanggapan responden mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju pada variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai indeks rerata sejumlah 364,4. Sebab nilai indeks rerata $3,64 > 3,0$ maka tanggapan responden perihal variabel sosialisasi perpajakan bisa dikatakan tinggi. Responden kebanyakan setuju bahwa sosialisasi perpajakan yang dijalankan oleh oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak bisa memberi pengetahuan dan pemahaman pada wajib pajak, penyuluhan pajak Kendaraan bermotor ialah sarana untuk penyampaian maklumat, sosialisasi pajak dilakukan secara teratur dengan memberikan maklumat yang terkini, sehingga wajib pajak mengetahui saat menjalankan kewajiban pajaknya, sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor yang rutin membuat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Samsat Kabupaten Pati, perpajakan kendaraan bermotor yang baik ialah wujud sosialisasi yang diselenggarakan secara berkala oleh Samsat Kabupaten Pati, kejelasan dalam penyampaian sosialisasi perpajakan bisa membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, pemberian maklumat perpajakan yang disampaikan oleh petugas sudah jelas, peran petugas pajak Kantor Samsat Kabupaten Pati amat vital dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan, dan penyampaian maklumat perpajakan oleh petugas pajak bisa

memudahhkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Sehingga dari hasil itu bisa peneliti simpulkan bahwa hipotesis pertama dalam studi ini ialah diterima dan tidak ditolak, disebabkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maknanya semakin baik sosialisasi perpajakan untuk masyarakat, maka akan bisa mempertinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pati.

Hasil studi ini, sudah didukung oleh penelitian I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati dengan judul penelitian, yakni Pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Semarang III. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.⁹

Selain itu juga selaras dengan teori yang menuturkan bahwa sosialisasi perpajakan ialah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan deskripsi, maklumat, dan pembinaan pada masyarakat pada umumnya perihal segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.¹⁰ Jika sosialisasi perpajakan sebagai tolak ukur suatu kepatuhan wajib pajak, maka perlu diadakannya sosialisasi perpajakan yang secara teratur. Dimaksudkan agar wajib pajak mengetahui maklumat atau sejumlah hal perihal perpajakan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan wajib pajak

Berlandaskan hasil uji yang dijalankan, peneliti nyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki imbas positif yang signifikan pada kepatuhan

⁹ I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati, "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 3, (2016): 2367.

¹⁰ Berlinda Noviani, "Pengaruh Implementasi Sistem E-Filling Pada kepatuhan wajib pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi," (skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 17.

wajib pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai antara t hitung sejumlah 8,662 lebih besar dengan nilai t tabel sejumlah 1,9849.

Tanggapan responden mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju pada variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai indeks rerata sejumlah 370,4. Sebab nilai indeks rerata $3,70 > 3,0$ maka tanggapan responden perihal variabel kesadaran wajib pajak bisa dikatakan tinggi. Responden kebanyakan setuju bahwa teknologi maklumat mempermudah pelaporan sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir, melunasi pajak bisa menunjang kemajuan dan pembangunan negara, melunasi pajak secara teratur bisa membantu mempertinggi kesejahteraan masyarakat, wajib pajak mematuhi peraturan dengan mengisi form pendaftaran yang sudah di sediakan, masyarakat percaya akan petugas pajak yang mampu mengelola hasil pajak, pelunasan yang tepat maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi, dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga dari hasil itu bisa peneliti simpulkan bahwa hipotesis pertama dalam studi ini ialah diterima dan tidak ditolak, disebabkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maknanya semakin baik kesadaran wajib pajak, maka akan bisa mempertinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pati.

Hasil studi ini, sudah didukung oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Ali Suardana. Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak PKB dan BBNKB pada kantor SAMSAT Denpasar.¹¹

Selain itu juga selaras dengan teori yang menuturkan bahwa kesadaran wajib pajak ialah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan

¹¹ Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Ali Suardana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, (2014): 351.

melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan selaras dengan ketentuan pajak yang berlaku dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.¹² Dengan timbulnya kesadaran wajib pajak pada perpajakannya, diharapkan bisa mempertinggi kepatuhan wajib pajak. Sebab kesadaran wajib pajak ialah suatu dorongan tersendiri dari tiap-tiap individu, untuk menjalankan kewajibannya.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan pada kepatuhan wajib pajak

Berlandaskan hasil uji yang dijalankan, peneliti nyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan (X_3) memiliki imbas positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai antara t hitung sejumlah 3.430 lebih besar dengan nilai t tabel sejumlah 1,9849.

Tanggapan responden mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju pada variabel kualitas pelayanan dengan nilai indeks rerata sejumlah 378,8. Sebab nilai indeks rerata $3,78 > 3,0$ maka tanggapan responden perihal variabel kualitas pelayanan bisa dikatakan tinggi. Responden kebanyakan setuju bahwa Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik, Para petugas memiliki penampilan yang rapi menarik dan sopan, Petugas pajak memberikan perhatian pada persoalan yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak, Fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dan lain-lain) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik, dan Fasilitas pembayaran bisa diakses internet tiap-tiap saat dengan cepat dan mudah dan maklumat yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan *up to date*.

Sehingga dari hasil itu bisa peneliti simpulkan bahwa hipotesis pertama dalam studi ini ialah diterima dan tidak ditolak, disebabkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maknanya semakin baik kualitas pelayanan kantor Samsat, maka akan

¹² Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, dkk., “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Pada kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6, No. 3, (2018): 408.

bisa mempertinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pati.

Hasil studi ini, sudah didukung oleh temuan yang dijalankan Ni Made Lisa Rusmayani dan Ni Luh Supadmi. Pengaruh kualitas pelayanan berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.¹³

Selain itu juga selaras dengan teori yang menuturkan bahwa kualitas layanan ialah suatu kesanggupan untuk memenuhi keperluan internal dan eksternal pelanggan secara konsisten sesuai prosedur.¹⁴ Dalam hal ini penyedia jasa dituntut untuk berupaya mengerti apa yang diinginkan pelanggan atau wajib pajak, sehingga memiliki harapan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Tidak hanya itu kualitas pelayanan juga harus terus ditingkatkan sehingga wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak

Berlandaskan hasil uji yang dijalankan, peneliti menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan (X_4) memiliki imbas positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai antara t hitung sejumlah 3.277 lebih besar dengan nilai t tabel sejumlah 1,9849.

Sehingga dari hasil itu bisa peneliti simpulkan bahwa hipotesis pertama dalam studi ini ialah diterima dan tidak ditolak, disebabkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maknanya semakin tegas sanksi perpajakan kantor yang dijalankan oleh Kantor Samsat Kabupaten Pati, maka akan bisa mempertinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pati.

Tanggapan responden mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju

¹³ Ni Made Lisa Rusmiyani dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, Dan Kualitas Pelayanan Pada kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 20, No. 1, (2017): 195.

¹⁴ Arista Atmadjati, *Layanan Prima Dalam Praktik Saat Ini*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 21.

pada variabel sanksi perpajakan dengan nilai indeks rerata sejumlah 378. Sebab nilai indeks rerata $3,78 > 3,0$ maka tanggapan responden perihal variabel sanksi perpajakan bisa dikatakan tinggi. Responden kebanyakan setuju bahwa adanya bunga dalam tunggakan pajak saat terlambat membayar, wajib pajak membayar kewajiban pajak dan tunggakan pajaknya, wajib Pajak yang terkena sanksi administrasi akan bertanggung jawab dan jera, wajib Pajak mengetahui sanksi administrasi yang akan diterima jika melanggar peraturan.

Hasil studi ini, sudah didukung oleh temuan yang dijalankan oleh Ida Ayu Dewi Widnyani dan Ketut Alit Suardana dengan judul Pengaruh sanksi perpajakan berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan.¹⁵

Selain itu juga didukung oleh teori yang menuturkan bahwa sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/patuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan ialah alat pencegah agar wajib pajak tidak menyeleweng dari norma perpajakan. Sanksi pajak terjadi sebab penyelewengan pada perundang-undangan perpajakan terlebih dalam tata cara perpajakan.¹⁶

Suatu peraturan dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman penalti yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. Berlandaskan jenisnya, jenis sanksi perpajakan bisa diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.¹⁷ Jadi dengan adanya sanksi

¹⁵ Ida Ayu Dewi Widnyani dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Pada kepatuhan wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 3, (2016): 2197.

¹⁶ Moh. Ardianto Refly Efendy, Siti Ragil Handayani, dkk., "Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Dinas Pemasukan Provinsi Jawa Timur Malang Kota)," *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan*, Vol. 5, No. 2, (2015): 3.

¹⁷ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 68.

diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan mematuhi.

5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayananann Kualitas Pelayanan pada kepatuhan wajib pajak

Berlandaskan hasil uji yang dijalankan, peneliti menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan (X_5) memiliki imbas positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai antara f hitung Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kualitas Pelayanan pada kepatuhan wajib pajak ialah sejumlah 27,162.

Tanggapan responden mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan kepatuhan wajib pajak yang tinggi pada Kantor Samsat Kabupaten Pati, dengan nilai indeks rerata sejumlah 390,7. Sebab nilai indeks rerata $3,90 > 3,0$ maka tanggapan responden perihal variabel kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan tinggi. Responden kebanyakan setuju bahwa melunasi pajak dengan disiplin akan mempertinggi kepatuhan wajib pajak, dengan mengetahui batas tanggal pembayaran dan pelaporan perpajakan diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam menyetor pajak dan melaporkan sesuai batas waktu yang di tentukan, sosialisasi pajak di terapkan agar wajib pajak sadar dan mematuhi kewajibannya, dengan adanya sanksi akan mempengaruhi tingkat kesadaran membayar wajib pajak, melunasi pajak kendaraan bermotor tepat waktu bermakna ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, Pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah daerah bukan pemerintah pusat, dan memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sehingga dari hasil itu bisa peneliti simpulkan bahwa hipotesis pertama dalam studi ini ialah diterima dan tidak ditolak, disebabkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maknanya semakin baik Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kualitas Pelayanan, maka akan bisa mempertinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pati.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor diperbolehkan menurut ulama, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai “pengeluaran” yang jika pengegeluran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sebagaimana kaidah ushul fiqih “ *Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun*”. Oleh karena itu pajak merupakan kewajiban negara dalam sebuah negara. Kepatuhan wajib pajak menurut perspektif islam sangat erat dengan sifat *amanah* seseorang yang mempunyai pengetahuan pajak yang luas dari sosialisasi perpajakan, memahami sanksi pajak, dan mempunyai kesadaran pajak yang tinggi mereka akan *amanah* memberikan kewajiban dari hartanya untuk negara.

Hasil studi ini, sudah didukung oleh temuan yang dijalankan I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati, bahwa pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berimbas positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.¹⁸

Selain itu juga didukung dengan teori yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) ialah wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya selaras dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan implementasi sanksi baik hukuman maupun administrasi. Kepatuhan pajak juga dimaknai sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.¹⁹ Lewat adanya sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan, diharapkan bisa mempengaruhi wajib pajak

¹⁸ I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati, “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 3, (2016): 2369.

¹⁹ Dewi Muharromah Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, dkk., “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran Dan Razia Lapangan Pada kepatuhan wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Klaten),” *Jurnal Kiat Bisnis*, Vol. 6, No. 5, (2017): 403.

untuk menjalankan kewajibannya yang sesuai aturan perundang-undangan.

